



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS SYIAH KUALA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUDATSIR
2. Jabatan : KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
3. NHK : 1002686

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **4.693.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 373 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Tanah Seluas 693 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 693.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 733 m2/210 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , WARISAN Rp. 2.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **274.000.000**

1. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
4. MOBIL, TOYOTA VELOZ MINI BUS Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **----**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **186.423.662**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **5.153.423.662**



III. HUTANG

Rp. 1.291.189.957

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.862.233.705

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.